



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3612-3623

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia

Yudistira Raihan Kurnia

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100200021@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Ini merupakan pengembangan dari penelitian berjudul "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." Tujuannya adalah menyelidiki tiga aspek utama: (1) Prinsip Demokrasi sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Bagaimana konsep demokrasi seperti Kedaulatan Rakyat dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia; (2) Hubungan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Hukum Indonesia: Menyoroti hubungan dan saling penguatan antara keduanya dalam kerangka konstitusional; (3) Strategi Mengatasi Tantangan dalam Menyelaraskan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Mengkaji hambatan integrasi hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan proses, faktor, tindakan, dan individu yang terlibat. Temuan menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila menggabungkan ide-ide hak asasi manusia seperti Kedaulatan Rakyat dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kata Kunci: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Tata Negara.*

Abstract

This research examines the relationship between human rights and democratic values in the Indonesian constitution. It builds on research entitled "Human Rights Protection and Democratic Challenges in the Indonesian Legal System Based on Pancasila." It aims to investigate three main aspects: (1) Democratic Principles as the Foundation of Human Rights Protection: How democratic concepts such as People's Sovereignty and Just and Civilized Humanity form the basis of human rights protection; (2) The Relationship between Human Rights and Democracy in Indonesian Law: Highlighting the relationship and mutual reinforcement between the two within the constitutional framework; (3) Strategies to Overcome Challenges in Harmonizing Human Rights and Democracy: Examines the obstacles to the integration of human rights and democracy in Indonesia. This research uses a descriptive approach to describe the processes, factors, actions and individuals involved. The findings show that Pancasila democracy incorporates human rights ideas such as People's Sovereignty and Just and Civilized Humanity.

Keyword: *Democracy, Human Rights, Indonesia, Constitutional Law System*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menjamin hak-hak fundamental bagi setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, melampaui batas geografis, waktu, dan berlaku untuk semua orang, menjadikannya elemen esensial dalam martabat manusia. HAM bersifat inheren, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling terkait, dan saling bergantung. Pemerintah diamanahkan untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan hak-hak asasi manusia ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dan merespons pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara (Zoelva, 2022).

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan dan wewenang untuk menentukan arah bangsa. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (pemerintahan), yang secara harfiah berarti "pemerintahan oleh rakyat" (Liddle, 2013). Demokrasi juga mencakup ciri-ciri seperti kebebasan berekspresi, perlindungan hak, dan pengambilan keputusan bersama. Namun, demokrasi memiliki risiko seperti anarki dan dominasi mayoritas, yang harus diatasi melalui mekanisme yang mencegah hasil tersebut (Fadillah et al., 2024).

Di Indonesia, hak asasi manusia dan demokrasi saling terkait. Demokrasi Pancasila sebagai landasan sistem politik Indonesia sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat yang menempatkan kekuasaan mutlak di tangan rakyat. Hak asasi manusia dalam konteks ini

merupakan landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi di Indonesia dibangun atas dasar keyakinan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dan hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam proses demokrasi. Peran negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia, dimana demokrasi Indonesia secara tradisional dibangun atas dasar persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara.

Hak asasi manusia dan demokrasi sangat dihargai dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi, yang berarti "pemerintahan oleh, untuk, dan dari rakyat", menjamin bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan pilihan-pilihan dibuat secara transparan dan demokratis. Sedangkan hak asasi manusia adalah konsep yang menjamin terpeliharanya dan ditegakkannya hak-hak dasar setiap individu, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan.

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sangat menekankan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi tidak bisa ada tanpa supremasi hukum yang melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia tidak bisa dianggap demokratis. Indonesia sebagai negara demokratis harus menjamin penghormatan dan penegakan hak asasi manusia melalui sistem hukum yang berfungsi dengan baik (Gunawan, 2018).

Pada kenyataannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Misalnya, korupsi politik, prasangka agama dan ras, serta kekerasan politik masih terjadi dalam sistem pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk melindungi hak asasi manusia.

Generasi muda memiliki peran penting dalam upaya memperkuat demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Mereka harus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memperbaiki sistem politik yang masih didominasi oleh kelas politik lama. Dengan cara ini, demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih seimbang dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga dan terlindungi.

Hak asasi manusia dan demokrasi memiliki peran penting dalam sistem hukum konstitusional Indonesia. Demokrasi menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan keputusan diambil secara transparan dan demokratis, sementara hak asasi manusia memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, sebagai negara demokratis, Indonesia harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi melalui sistem hukum yang berfungsi dengan baik, serta mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi guna mengubah sistem politik yang masih dikuasai oleh elit politik lama (Manan, 2010).

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Nugroho, Yusuf & Setyawan, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "ilmiah" adalah ilmu pengetahuan atau kelengkapan standar serta norma yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang menjamin kebenaran setinggi-tingginya suatu temuan.

Pendekatan penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang jawaban, partisipasi, atau kesan masyarakat. Alhasil, pembahasan yang diberikan harus bersifat kualitatif atau menggunakan deskripsi naratif dengan kata-kata. Penelitian deskriptif berupaya memberikan gambaran yang tepat serta akurat tentang proses, objek, aktivitas, serta manusia (Dimiyati & Wardiono, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip demokrasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Pancasila, dasar negara Indonesia, bukan hanya sebatas ideologi, tetapi juga landasan kokoh bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Lima prinsip Pancasila saling terkait dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (Horowitz, 2013):

1. Kedaulatan Rakyat: rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi Pancasila memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilu, musyawarah, dan berbagai cara lainnya. Hak partisipasi ini, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, menjadi esensi demokrasi Pancasila.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembelaan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam politik Indonesia.
3. Persatuan Indonesia: Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi fondasi utama. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta mendorong kerukunan dan toleransi antar warga negara. Perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam upaya memajukan persatuan nasional.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: masyarakat dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan politik diambil melalui diskusi masyarakat dan perwakilan politik yang mencerminkan kepentingan rakyat. Pendekatan ini mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia ke dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
5. Mekanisme Konsultasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Demokrasi Pancasila memanfaatkan berbagai alat konsultasi publik seperti dialog komunitas, forum diskusi, dan pertemuan publik untuk mengumpulkan umpan balik publik mengenai berbagai topik kebijakan publik. Warga negara berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam demokrasi Pancasila. Tujuan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan dan membentuk organisasi terkait untuk menjaga dan meningkatkan hak asasi manusianya. Pancasila bukan hanya sebatas teks, tetapi pedoman hidup yang menuntun Indonesia menuju masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Memahami dan mengamalkan Pancasila merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia membawa pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi tidak hanya menjadi fondasi bagi struktur geopolitik negara, tetapi juga memengaruhi cara pandang, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh pemerintah dan masyarakat (Salmawati, 2022). Demokrasi memberikan manfaat bagi sistem pemerintahan dan institusi nasional lainnya. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, seperti memilih dan menyuarakan pendapat, memungkinkan lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi lebih efektif dalam melindungi hak-hak manusia dan warga negara. Demokrasi bukan hanya sistem hukum, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk dan menjaga hak-hak mereka.

Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga fondasi penting bagi penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki peran krusial dalam mendorong berbagai elemen penting:

1. Penegakan Hukum yang Adil:
 - 1) Memperkuat Lembaga Peradilan: Demokrasi mendorong penguatan lembaga peradilan agar independen, imparial, dan akuntabel. Hal ini memastikan tegaknya hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
 - 2) Akses Keadilan bagi Semua: Demokrasi menjunjung tinggi hak setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini berarti meniadakan diskriminasi dalam proses hukum dan memastikan semua orang diperlakukan dengan sama di depan hukum.
2. Perlindungan Hak-Hak Minoritas:
 - 1) Menghormati Kebebasan Beragama: Demokrasi menjamin kebebasan beragama bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan mereka.
 - 2) Melawan Diskriminasi: Demokrasi melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan misinformasi. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran.
 - 3) Partisipasi Politik yang Bermakna: Demokrasi memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sehingga suara mereka didengar dan aspirasinya terwakili.
3. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel:
 - 1) Transparansi dan Akuntabilitas: Demokrasi memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada rakyat. Hal ini meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
 - 2) Partisipasi Publik dalam Kebijakan: Demokrasi mendorong partisipasi aktif publik dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
 - 3) Memperkuat Promosi HAM: Partisipasi publik yang aktif dalam proses politik memperkuat promosi hak asasi manusia melalui berbagai saluran(Layyin, n.d.).

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh di Indonesia bagaikan menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan demokrasi yang kuat, kita dapat mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dan membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Hubungan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan dua pilar fundamental yang menjadi pedoman bagi sistem hukum Indonesia. Hal ini tercantum dengan jelas dalam

UUD 1945, di mana Indonesia berkomitmen penuh untuk melindungi HAM sebagai landasan utama dalam membangun sistem hukumnya. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Sistem dan kebijakan hukum Indonesia dirancang dan diimplementasikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi di Indonesia memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik melalui berbagai mekanisme, seperti pemilu, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berorganisasi. Hal ini menjamin bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan. Lebih lanjut, demokrasi juga berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah. Lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

Sistem peradilan yang independen juga menjamin penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Instansi pemerintah bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya menjunjung dan melindungi hak-hak individu. Sistem hukum konstitusional mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia dengan memastikan semua pihak mendapatkan putusan pengadilan yang adil.

Berbagai organisasi otonom, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berperan penting dalam memastikan demokrasi berjalan efisien dan adil bagi semua. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sehingga memungkinkan sistem hukum Indonesia untuk mendorong demokrasi yang inklusif dan berpusat pada rakyat. Sistem hukum melindungi hak-hak individu dan mendukung cita-cita inti demokrasi. Kerangka hukum konstitusi Indonesia mencakup hak asasi manusia dan demokrasi, yang sangat penting bagi stabilitas dan keseimbangan negara. Beberapa faktor yang terkait dengan hak dan demokrasi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: (Sucipto dkk, 2023):

1. Kedaulatan rakyat merupakan elemen kunci dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mengacu pada pemikiran bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan mereka. Dalam perspektif ini, demokrasi Indonesia bergantung pada rakyat yang menjalankan kekuasaan melalui sistem pemilihan langsung dan perwakilan.
2. Hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam sistem hukum demokrasi dan konstitusional Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak sipil dan politik, yang penting

bagi kebebasan dan keseimbangan masyarakat. UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang dilindungi oleh lembaga dan proses hukum terkait.

3. Pemilihan umum dan perwakilan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pengawasan pemerintah. Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, pemilu diselenggarakan secara langsung dan rahasia untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan.
4. Batasan Kekuasaan: Kekuasaan negara harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan terbaik warga negara. Di Indonesia, kewenangan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan menghindari penyalahgunaan dan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
5. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka ini, kebebasan informasi, pers, dan supremasi hukum berfungsi sebagai pengawas terhadap fungsi demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara jujur dan akuntabel.

Ringkasnya, sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menekankan pada keterlibatan masyarakat melalui pemilihan umum langsung dan perwakilan, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas negara sekaligus memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk keuntungan rakyat.

Menghadapi tantangan untuk mempertahankan keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia

Menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan demokrasi merupakan kesulitan besar bagi sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; demokrasi yang berfungsi dengan baik sering kali menjadi landasan untuk menjaga dan memajukan hak asasi manusia, sedangkan perlindungan hak asasi manusia yang berhasil dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi. Namun pada kenyataannya, terdapat kendala-kendala tertentu yang menghambat penerapan dan pemenuhan kedua pengertian tersebut (Perbowo, 2016).

Kedua nilai ini saling terkait erat, serta demokrasi berfungsi sebagai cara untuk mencapai hak asasi manusia. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memasukkan hak asasi manusia serta demokrasi ke dalam sistem hukumnya.

Pertama, Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi hak asasi manusia, meskipun telah menandatangani banyak perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Implementasinya masih belum optimal karena infrastruktur yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat, dan korupsi di pemerintahan. Kedua, meskipun sistem demokrasi Indonesia sebagian besar stabil, terdapat beberapa kelemahan, seperti korupsi di pemerintahan dan intoleransi agama dan ras yang masih terjadi. Kebebasan berpendapat dan pers juga dibatasi, begitu pula keterlibatan masyarakat dalam politik. Ketiga, hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia harus ditingkatkan. Meskipun demokrasi memfasilitasi pelestarian hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia memerlukan sistem demokrasi yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilestarikan sejalan dengan hukum konstitusi Indonesia, yang memerlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif. Demokrasi juga harus dipupuk melalui keterlibatan politik yang aktif, serta kebebasan intelektual dan jurnalistik yang luas (Rif'an & Khory, 2015).

i satu sisi, demokrasi membuka ruang bagi partisipasi rakyat dan perlindungan hak-hak fundamental. Di sisi lain, penegakan HAM yang efektif membutuhkan kerangka hukum dan institusi yang kuat. Berikut beberapa tantangan utama dalam mewujudkan keseimbangan ini:

1. Penegakan Hukum yang Lemah:

- 1) Kekurangan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum HAM.
- 2) Keterbatasan Dana: Keterbatasan anggaran untuk operasional penegakan hukum HAM dapat menghambat efektivitas investigasi, penuntutan, dan perlindungan saksi.
- 3) Intervensi Politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat memengaruhi proses penegakan hukum HAM, sehingga sulit mencapai keadilan yang objektif dan imparial.

2. Kebijakan Diskriminatif:

- 1) Keberadaan Peraturan Diskriminatif: Beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah mungkin mendiskriminasi kelompok minoritas atau rentan, seperti perempuan, etnis minoritas, dan komunitas LGBTQ. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang menjamin kesetaraan hak bagi semua orang.

- 2) Stigma dan Stereotip: Stigma dan stereotip terhadap kelompok minoritas dapat memperkuat diskriminasi dan memicu pelanggaran HAM.
3. Ketimpangan Akses dan Partisipasi:
 - 1) Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat membatasi akses kelompok marginal terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
 - 2) Kurangnya Kesadaran HAM: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM dapat membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi.
4. Ketimpangan dalam Akses dan Partisipasi: Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem politik atau kebijakan pemerintah. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lainnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga menghambat perlindungan hak-hak yang setara bagi semua orang.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil:

1. Memperkuat Penegakan Hukum: Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum, memastikan independensi peradilan, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penegakan hukum HAM.
2. Meninjau Ulang Kebijakan: Melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan dan kebijakan yang diskriminatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.
3. Meningkatkan Kesadaran HAM: Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi HAM secara komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Memberikan ruang dan akses yang lebih luas bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.
5. Membangun Kolaborasi: Membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat upaya perlindungan HAM dan demokrasi.

Mencapai keseimbangan antara HAM dan demokrasi di Indonesia membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pihak. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi hak-hak

fundamental bagi seluruh rakyatnya (Rizky & Zulkifli, 2023).

Menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia adalah sebuah tantangan krusial. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam mempromosikan harmoni antara hak asasi manusia dan demokrasi, melalui pendidikan, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi peradilan yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan diri menjadi negara yang lebih demokratis dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terlindungi dan kekuasaan rakyat dijalankan dengan keadilan dan integritas.

SIMPULAN

Demokrasi melindungi HAM melalui pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan akses ke peradilan, serta menghormati hak minoritas dan kebebasan beragama. Sistem hukum Indonesia menekankan hak asasi manusia seperti kehidupan, agama, pendapat, dan keadilan sesuai UUD 1945. Komitmen ini terlihat dalam kebijakan dan partisipasi masyarakat, dengan peradilan independen dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memantau kepatuhan pemerintah. Kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia adalah bagian integral dari sistem ini, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi termasuk penegakan hukum terbatas, konflik antara hak dan keamanan, kebijakan diskriminatif, serta kesenjangan. Solusi meliputi memperkuat peradilan, mendorong kebijakan inklusif, meningkatkan pendidikan, dan menggalakkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. *Fakultas Hukum UMS, Surakarta*.
- Fadillah, N., Himmawan, D., & Umam, A. K. (2024). Elections And Development Of Democracy In Indonesia. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 17–23.
- Gunawan, B. P. (2018). Democracy In Indonesia Constitutional Life. *Proceeding 10th ADRI 2017 International Multidisciplinary Conference and Call for Paper, Batam, March 3-4, 2017*, 152.
- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Layyin, M. (n.d.). The Democracy management In Indonesia Constitution. *Proceedings of*

the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Liddle, R. W. (2013). Improving the quality of democracy in Indonesia. *Indonesia, 96*, 59–80.

Manan, M. (2010). Constitutional democracy for divided societies: The Indonesian case. *J. Pol. & L., 3*, 125.

Nugroho, Yusuf, S., & Setyawan. (2014). Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Klasifikasi Masa Studi Mahasiswa Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Menggunakan Algoritma C4.5, VI(1)*, 84–91.

Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. *Const. Rev., 8*, 37.